

BAB I

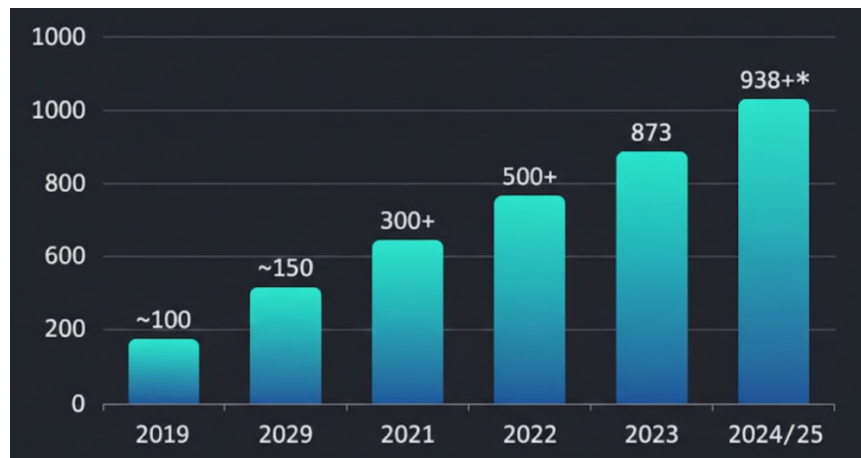
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis saat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja, melainkan banyak perusahaan yang ada di Indonesia telah melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk kewajiban moral dan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dipahami sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan (Sabaruddin et al., 2025). Perusahaan berada dalam tekanan pemangku kepentingan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Rini & Hasim, 2021). Tekanan yang dialami oleh perusahaan mengakibatkan peningkatan perhatian terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam praktik bisnis (Rini & Hasim, 2021). Kondisi ini mengakibatkan perusahaan untuk mengintegrasikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke dalam strategi bisnis secara berkelanjutan, sehingga tidak dipandang hanya sebagai kegiatan cuci tangan. Implementasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan yang dikenal dengan konsep *triple bottom line*. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang konsisten berfungsi sebagai sarana membangun hubungan perusahaan di mata masyarakat yang baik, karena keberadaan dan aktivitas entitas bisnis dinilai sejalan dengan aturan dan nilai yang ada. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* meminimalisir terjadinya konflik antara pihak entitas

bisnis dengan masyarakat setempat, sehingga keberadaan entitas bisnis akan menjalin hubungan baik.

Menurut (Sabaruddin et al., 2025) praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kewajiban moral dan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya yang terkena dampak negatif dalam aktivitas bisnis yang dilakukan. Bentuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)* beraneka ragam, karena sebagai rasa kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* berkaitan hubungan antara entitas bisnis swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dan masyarakat dengan tujuan penerapan tanggung jawab sosial, pembangunan yang memiliki dampak berkelanjutan, sehingga bisa membantu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan suatu perusahaan membantu menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya dengan menyerap banyak tenaga kerja (Rini & Hasim, 2021). Lingkungan dan masyarakat sekitar harus merasakan bentuk tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh entitas bisnis, karena telah merasakan dampak negatif dari berjalannya operasi. Dampak positif yang dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya sudah wajar-wajar saja diterima setiap periodenya. Keberadaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan mengurangi rasa kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar beroperasinya enteitas bisnis. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan memberikan dampak positif dari berbagai pihak yang terkena dampak berjalannya aktivitas bisnis dari entitas bisnis yang ada. Lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan entitas bisnis, agar pelaksanaan kegiatan ekonomi tidak merugikan lingkungan hidup sekitarnya dan akan mempertahankan secara lama demi keberlanjutan usahanya. Bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan memberikan imbalan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk imbalan dampak negatif pelaksanaan kegiatan operasional suatu entitas bisnis.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh entitas bisnis di Indonesia

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menekankan pentingnya kontribusi sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Kewajiban entitas bisnis sebagai pemberi bantuan sosial terhadap masyarakat akan mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah republik Indonesia. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan lebih tertata dan tertib dengan adanya undang – undang yang mengatur didalamnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi dianggap sebagai aktivitas sukarela, tetapi telah menjadi kewajiban hukum yang melekat, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di sektor pengelolaan sumber daya alam (Rini & Hasim, 2021). Pada saat ini tidak hanya perusahaan yang beroperasi di sektor pengelolaan sumber daya alam, tetapi seluruh perusahaan yang bergerak di berbagai sektor telah melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bentuk pertanggung jawaban ini akan menghasilkan beragam macam kontribusi berkelanjutan untuk lingkungan dan

masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengacu pada komitmen entitas bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* perusahaan, serta masyarakat lingkungan sekitarnya untuk saling memberikan dampak positif tanpa merasakan kerugian antar salah satu pihaknya. Pemberian program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya akan menumbuhkan rasa persatuan dalam membangun kehidupan kemanusiaan yang lebih baik dengan waktu jangka panjang. Penegakan aturan yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati oleh pelaku entitas bisnis. Entitas bisnis yang baik akan melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat agar terlihat menaati aturan yang ada. Banyak kasus yang ditemukan di Indonesia, bahwa entitas bisnis telah menimbulkan kerugian di lingkungan masyarakat sekitarnya. Kerugian tersebut akan mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan sekitar. Pihak – pihak yang berkepentingan dalam program ini harus ditaati dan dijalankan sesuai dengan aturan.

Sebelum adanya penelitian ini, terdapat penelitian yang dibahas oleh (Rini & Hasim, 2021) tentang pemberian program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Pemberian program ini dilakukan oleh entitas bisnis berupa 3 (tiga) hotel Bintang 5 (lima) yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali. Setiap hotel tersebut tidak selalu memiliki Divisi atau Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tetapi selalu memberikan program kepedulian sosial sebagai rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian selanjutnya dibahas oleh (Hajad et al., 2025) yang membahas terkait pemberian dampak positif terhadap masyarakat Desa Damaran Baru, akibat adanya entitas bisnis berupa wisata diwilayahnya. Pemberian dampak positif ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam membantu segi ekonomi masyarakat sekitarnya. Program Eco-Tourism akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar wilayah wisata tersebut. Pelaksanaan program ini akan memberikan manfaat bagi warga Desa Damaran Baru. Penelitian yang terakhir dibahas oleh (Sabaruddin et al., 2025)

dengan pembahasan bahwasanya Pemerintah Daerah Kolaka telah menerima manfaat program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis yang berada di wilayahnya. Pelaksanaan penelitiannya dilakukan dengan kepentingan untuk mengetahui strategi pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penelitiannya hanya ingin mengetahui strategi pengelolaannya tanpa didasari adanya permasalahan antara pemerintah daerah kabupaten kolaka dengan masyarakatnya. Penelitian ini akan memberikan analisis pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semambung dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis di lingkungan sekitarnya. Pengelolaan yang dilakukan akan memberikan penilaian dari masyarakat. Persepsi dari berbagai kubu akan muncul dalam penelitian ini sebagai bahan pembahasan permasalahan yang di lokasi penelitian.

Pemerintah Desa Semambung memiliki potensi tinggi dalam penerimaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari Entitas Bisnis di lingkungan sekitarnya. Dalam wilayah pemerintah desa semambung dikelilingi oleh entitas bisnis besar yang setiap tahunnya memberikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat lingkungannya. Berdasarkan pengamatan masyarakat dan data yang ada, pemerintah desa semambung sering menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk disalurkan dan dikontribusikan sesuai arahan dari entitas bisnis yang memberi. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai berdampak sejak tahun 2018 sampai saat ini yang memiliki dampak positif. Program ini akan membutuhkan suatu pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan konflik (Rini & Hasim, 2021). Pengelolaan yang baik akan mencerminkan keuntungan tanpa adanya rasa kerugian dari salah satu pihak yang terlibat. Pemerintah desa semambung sebaiknya membentuk suatu pengendalian internal yang baik dan kuat untuk mengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai instruksi dari entitas bisnis pemberi program. Pemberian program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dijadikan ladang pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa semabung. Pemenuhan kebutuhan tidak serta merta hanya melihat dari jarak jauh saja, tetapi harus terjun berinteraksi dengan masyarakat langsung (Sabaruddin et al., 2025). Interaksi yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk mengetahui kebutuhan yang sedang dibutuhkannya. Kontribusi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan memiliki nilai tambah yang banyak jika mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Entitas bisnis akan memperoleh nilai balik yang akan membantu dan mempermudah proses keberlangsungan bisnisnya. Pemerintah desa semabung memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin untuk keberlangsungan kehidupan yang layak di masyarakatnya. Masyarakat desa berhak bersuara terkait gangguan yang terjadi akibat adanya proses bisnis yang berlangsung dilingkungannya. Entitas bisnis akan selalu berkembang dan laju di setiap periodenya jika hubungan kebaikan terjadi di setiap proses keberlangsungan yang ada. Pemerintah desa semabung menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis berikut

Tabel 1.1 Jumlah entitas bisnis pemberi program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Desa Semabung

| No. | Nama Entitas Bisnis | Keterangan |
|------------|---------------------------------|---|
| 1. | PLN Nusantara Power | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |
| 2. | PT Jamkrindo Kanwil VI Surabaya | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |
| 3. | JNE Cabang Utama Surabaya | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |
| 4. | J&T Cabang Utama Surabaya | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 5. | PT Adira Dinamika Multi Finance | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |
| 6. | PT Pertamina (Persero) | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |
| 7. | Gedung Serba Guna Soerokromo | Memberikan program melalui pemerintah desa semabung |

Sumber: diperoleh peneliti melalui wawancara kepada kepala desa semabung

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa semabung telah menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis yang beroperasi di lingkungan sekitarnya. Dari data yang diberikan oleh kepala desa semabung menyatakan bahwa telah menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PLN Nusantara Power, PT Jamkrindo Kanwil VI Surabaya, JNE Cabang Utama Surabaya. Penerimaan program tersebut tidak konsisten setiap tahunnya. Dari pihak pemerintah desa semabung tidak memberikan kewajiban yang mengikat kepada entitas bisnis, namun pihak entitas bisnis itu sendiri memiliki kesadaran dalam pengimplementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemberian bantuan tanggung jawab sosial ini akan dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya untuk pembangunan berkelanjutan yang ada di lingkungan pemerintah desa semabung. Penyerapan sumber daya yang di miliki oleh pemerintah desa semabung perlu digunakan seluruhnya untuk keberlangsungan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

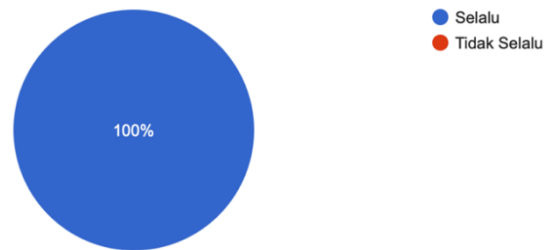
Pemerintah desa semabung memiliki peran pengendali atas penyaluran program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa semabung dalam menerima dan menyalurkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki peluang dan tantangan didalamnya (Rini & Hasim, 2021). Peluang yang dirasakan berupa percepatan Pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan terhadap masyarakatnya.

Tantangannya berupa penilaian negatif dan prasangka buruk dari masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari adanya program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Program-program ini sering kali bersifat sektoral, tidak terintegrasi ke dalam rencana pembangunan desa, dan kurang melibatkan para pemangku kepentingan setempat secara menyeluruh (Sabaruddin et al., 2025). Akibatnya, dampak positif dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan belum secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa. Kejadian ini mengakibatkan para pemimpin sekitar desa semambung menjadi bingung, karena pemberian yang dilakukan oleh entitas bisnis selama ini belum dikenang dengan baik oleh masyarakat. Keputusan yang harus diambil oleh pemerintah desa semambung seharusnya menyamakan persepsi dengan pihak entitas bisnis untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan yang baik. Pembangunan yang baik akan memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat (Sabaruddin et al., 2025). Banyak ditemukan pembangunan yang memiliki dampak berkelanjutan kepada masyarakat. realisasi pelaksanaan ini harus selalu dilakukan oleh pemerintah desa semambung agar meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat sekitar.

Survei pra-penelitian dilakukan sebagai langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh Pemerintah Desa Semambung. Fokus survei diarahkan pada mekanisme pengelolaan bantuan CSR yang berasal dari berbagai entitas bisnis yang beroperasi di sekitar wilayah desa. Pengumpulan data melibatkan empat informan kunci yang memiliki pemahaman dan keterlibatan dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu Kepala Desa Semambung, Sekretaris Desa Semambung, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai kapasitas dan praktik pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Semambung dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan program CSR bagi masyarakat desa.

Apakah pemerintah desa semabung selalu menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pembagian program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

4 jawaban



Gambar 1.2 Data Pra Penelitian Pemerintah Desa Semabung

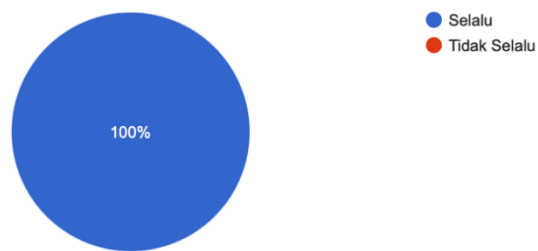
Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.2 menyajikan diagram mengenai aspek transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Semabung. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan Pemerintah Desa Semabung telah menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh perangkat desa maupun masyarakat. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena mencerminkan tingkat keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tingkat keterbukaan tersebut sering dijadikan indikator untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program pemerintah menuntut adanya penyampaian informasi yang akurat dan mudah diakses. Pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersumber dari kontribusi entitas bisnis juga memerlukan penerapan prinsip transparansi secara konsisten, terutama dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penyajian informasi yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan para

pemangku kepentingan serta memberikan keyakinan bahwa dana yang disalurkan telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Apakah pemerintah desa semambung selalu menyusun laporan hasil kegiatan atau sejenisnya jika sudah melakukan pembagian program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

4 jawaban



Gambar 1.3 Data Pra Penelitian Pemerintah Desa Semambung

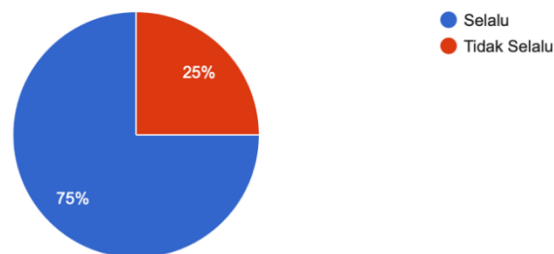
Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.3 menyajikan hasil survei terkait aspek pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap empat responden. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh responden (100%) menyatakan bahwa Pemerintah Desa Semambung secara rutin menyusun serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pada setiap pelaksanaan program. Keberadaan akuntabilitas memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan transparansi dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya entitas bisnis sebagai pemberi bantuan, memerlukan informasi yang jelas mengenai penggunaan sumber daya dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa program telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Konsistensi dalam menerapkan akuntabilitas juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan. Ketidakmampuan organisasi pemerintah dalam

mempertahankan praktik akuntabilitas secara berkelanjutan dapat memengaruhi penilaian pihak eksternal, termasuk donatur, terhadap kesediaan mereka untuk berpartisipasi atau memberikan dukungan pada program-program yang diselenggarakan.

Apakah selalu ada evaluasi setiap melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

4 jawaban



Gambar 1.4 Data Pra Penelitian Pemerintah Desa Semambung

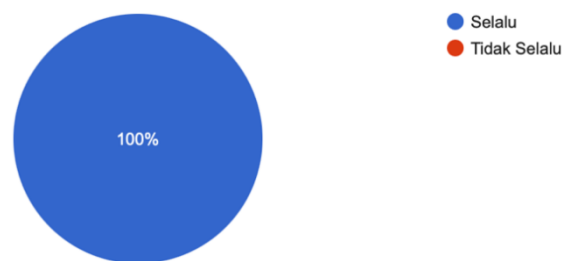
Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.4 menyajikan hasil survei mengenai pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Semambung. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebesar 75% responden menyatakan evaluasi terhadap kegiatan operasional telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebanyak 25% responden memiliki pandangan yang berbeda dan menilai bahwa proses evaluasi belum dilakukan secara konsisten. Pelaksanaan evaluasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah karena berfungsi sebagai sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan program serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih optimal. Kemampuan perangkat desa dalam menindaklanjuti kritik, masukan, dan aspirasi dari masyarakat

maupun pihak-pihak yang berkepentingan juga tercermin melalui proses evaluasi yang dilakukan. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme evaluasi terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dari entitas bisnis di sekitar wilayah Desa Semambung masih belum diterapkan secara menyeluruh pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Apakah pemerintah desa semambung selalu melibatkan seluruh jajaran perangkat desa dalam melaksanakan pembagian program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

4 jawaban



Gambar 1.5 Data Pra Penelitian Pemerintah Desa Semambung

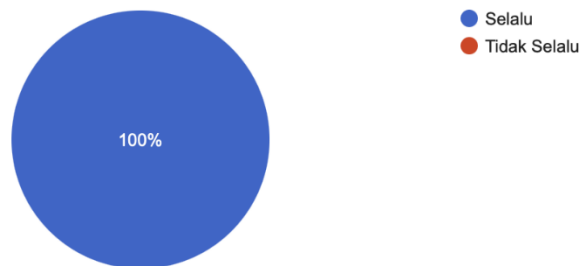
Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.5 menampilkan hasil survei mengenai keterlibatan perangkat desa dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan distribusi program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Desa Semambung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh entitas bisnis pemberi program. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan Pemerintah Desa Semambung telah melibatkan jajaran perangkat desa dalam pelaksanaan program CSR. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan organisasi memiliki peran penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, termasuk dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, serta rekomendasi dapat mendorong terciptanya pengambilan keputusan yang lebih

komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi juga mencerminkan sejauh mana organisasi menerapkan prinsip keterbukaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Temuan pada survei ini mengindikasikan bahwa meskipun perangkat desa telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program CSR, keterlibatan anggota organisasi dan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan anggaran masih belum optimal.

Apakah pemerintah desa semabung selalu memanfaatkan sumber daya dengan baik dalam pelaksanaan pembagian program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

4 jawaban



Gambar 1.6 Data Pra Penelitian Pemerintah Desa Semabung

Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.6 menyajikan hasil survei mengenai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Semabung dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan sumber daya yang tersedia selalu digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Sumber daya merupakan aset penting yang dimiliki organisasi dan berperan sebagai faktor pendukung dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mendorong tercapainya hasil yang optimal. Praktik pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semabung saat ini masih berfokus pada kapasitas internal organisasi. Cakupan

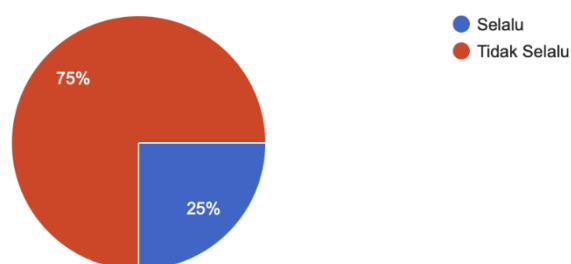
pemanfaatan tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang terdampak oleh aktivitas entitas bisnis di lingkungan sekitar desa. Pengelolaan sumber daya yang ideal seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai unsur yang terlibat sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Survey pra penelitian selanjutnya ditujukan pada pemimpin dari setiap rukun warga di desa semambung. Jumlah rukun warga yang ada pada desa semambung terdapat 8 (delapan). Pertanyaan yang diajukan kepada rukun warga desa semambung digunakan untuk memperkuat argumen yang dijawab oleh pemerintah desa semambung pada survey pra penelitian pertama. Pandangan dari 2 (dua) kubu ini akan memberikan titik terang dari awal mulanya penelitian ini dilakukan berupa permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa semambung. Berikut hasil survey pra penelitian pada rukun warga di desa semambung.

Apakah pada saat pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Desa Semambung selalu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat akibat dampak dari berjalannya operasi entitas bisnis di lingkungan sekitarnya?

Contohnya berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan terhadap masyarakat.

8 jawaban



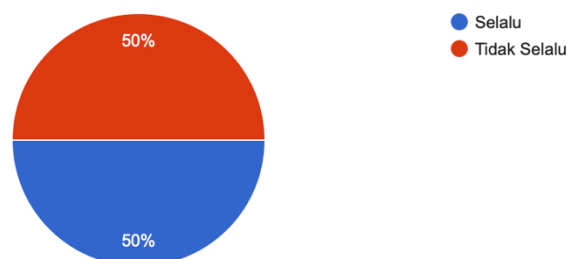
Gambar 1.7 Data Pra Penelitian Masyarakat Desa Semambung

Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.7 menunjukkan diagram mengenai pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh pemerintah desa semambung telah memenuhi kebutuhan masyarakat akibat dari berjalannya operasi entitas bisnis di lingkungan sekitarnya dengan hasil 75% ketua rukun warga berpendapat tidak selalu memenuhi kebutuhan warganya dan 25% ketua rukun warga berpendapat telah memenuhi kebutuhan warganya. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang baik seharusnya telah memenuhi kebutuhan akibat adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pelaksanaan program di desa semambung masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak aktivitas entitas bisnis. Dominasi pendapat rukun warga akan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi dan kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini akan meningkatkan efektivitas program.

Apakah Pemerintah Desa Semambung selalu melaksanakan pengelolaan dengan baik pada saat melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR)

8 jawaban



Gambar 1.8 Data Pra Penelitian Masyarakat Desa Semambung

Sumber: Diolah peneliti, Januari 2026

Gambar 1.8 menunjukkan diagram mengenai sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa semambung dalam melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis lingkungan sekitarnya dengan hasil 50% rukun warga setuju bahwa pemerintah desa semambung selalu melakukan sistem pengelolaan dengan baik pada saat melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan 50% ketua rukun warga tidak setuju jika pemerintah desa semambung selalu melakukan sistem pengelolaan dengan baik pada saat melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa semambung belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan yang baik dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kelemahan yang terjadi ini menunjukkan perlu adanya perbaikan untuk melakukan pengelolaan dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Hasil survey pra penelitian yang ditujukan kepada perangkat desa semambung dengan masyarakat desa semambung memiliki perbedaan. Pada saat peneliti memberikan survey pra penelitian kepada perangkat desa, hasilnya perangkat desa selalu melakukan pengelolaan dengan baik pada saat menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis lingkungan sekitarnya. Survey pra penelitian selanjutnya ditujukan kepada ketua rukun warga desa semambung, hasilnya sebagian besar tidak menyetujui jika pemerintah desa semambung melakukan distribusi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, selanjutnya sebagian rukun warga juga tidak menyetujui terkait sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa semambung telah berjalan dengan baik. Perbedaan pandangan ini memicu timbulnya pertikaian permasalahan yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat (Hajad et al., 2025). Sebagian besar masyarakat yang menerima manfaat dari program ini belum sepenuhnya memihak kepada pemerintah desa. Keberadaan entitas bisnis di lingkungan desa semambung, akan memberikan pertikaian

permasalahan. Sebagian besar masyarakat desa semambung meresahkan tidak adanya pembangunan berkelanjutan di lingkungannya dari adanya aktivitas bisnis yang terjadi. Aspirasi yang selama ini diinginkan oleh masyarakat berupa pembangunan yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari – hari yang dilakukan oleh masyarakat. Pihak entitas bisnis sebetulnya sudah menggagalkan kewajiban untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kejadian ini akan menimbulkan penilaian buruk dari masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Penilaian buruk dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan mengakibatkan turunnya reputasi entitas bisnis yang beroperasi dan pemerintah desa (Sabaruddin et al., 2025). Perlu adanya bukti pembangunan yang memadai untuk keberlanjutan entitas bisnis yang beroperasi di lingkungan desa semambung.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai terlihat sejak tahun 2018 dengan munculnya berbagai prasangka buruk dari masyarakat dalam pengelolaannya. Bentuk pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh pemerintah desa semambung menimbulkan konflik, karena kurangnya transparansi yang dilakukan dan pembangunan yang terjadi tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Masalah selanjutnya yang muncul yaitu, pemberian program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak tepat sasaran kepada kelompok masyarakat. Tanggapan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa semambung berupa menampakkan proses transparansi kepada masyarakat setiap menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis di lingkungan sekitarnya (Sabaruddin et al., 2025). Dari adanya proses transparansi tersebut masyarakat masih belum puas, dikarenakan penyaluran tidak tepat sasaran. Upaya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa semambung belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan dalam pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ketidakpuasan masyarakat menandakan bahwa proses transparansi perlu diiringi dengan perencanaan yang baik (Hajad et al., 2025). Partisipasi aktif dari masyarakat dengan pemerintah desa semambung akan memetakan kebutuhan – kebutuhan

yang ada di lapangan. Pemerintah desa semabung perlu melakukan koordinasi dengan pihak entitas bisnis terkait keluhan masyarakat, sehingga kebutuhan dan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat akan terpenuhi sesuai dengan ekspektasinya. Koordinasi yang baik berupa koordinasi silang antara pemerintah desa semabung dengan masyarakat, lalu pemerintah desa semabung dengan entitas bisnis. Koordinasi yang baik untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan agar tidak terjadi salah pengertian di antara pihak – pihak yang memiliki pengaruh didalamnya.

Permasalahan antara pemerintah desa semabung dengan masyarakat menjadi konflik sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya. Pemerintah desa semabung terus melakukan proses transparansi dan akuntabilitas agar terlihat baik kepada masyarakat, bahwasanya dari pihaknya sudah melakukan kebijakan pelaksanaan program sesuai *standar operasional prosedur (SOP)*. Pemerintah Desa Semabung memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program - program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Permasalahan ini sejalan dengan (Sabaruddin et al., 2025) pendekatan dialog dengan para pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam strategi *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas dari sisi perusahaan. Pendekatan dialog secara berkelanjutan diharapkan mampu menjadi sarana untuk menyatukan persepsi. Komunikasi terbuka akan mengurangi kesalahpahaman dalam konflik sosial yang terjadi. Pemerintah desa harus mempertimbangkan setiap kali pengambilan Keputusan agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bentuk aspirasi masyarakat harus didengarkan oleh pemerintah desa semabung sebagai bahan evaluasi untuk ke depan jika menerima bantuan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis. Aspirasi dan permasalahan yang terjadi harus dikomunikasikan dengan pihak entitas bisnis. Pihak entitas bisnis biasanya akan memberikan tawaran

kepada pemerintah desa, terkait kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari – harinya. Kegiatan ini tidak semata untuk dimanfaatkan oleh masyarakat desa semabung dalam memperoleh bantuan ataupun kontribusi dari entitas bisnis, melainkan para masyarakat sedang mempertanyakan terkait kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Heterogen dari masyarakat desa semabung akan memicu timbulnya saling memberikan masukan dan saran di setiap permasalahan yang terjadi (Hajad et al., 2025). Pihak – pihak pemangku kepentingan yang ada di lingkungan desa semabung saling berkolaborasi dengan para pemuda yang ada, penilaian yang diberikan kepada pemerintah desa semabung tidak serta merta dibicarakan tanpa adanya bukti pendukung. Tidak menutup kemungkinan bahwa para pemuda ini telah memiliki intelektual yang tinggi, sehingga kritikan yang diberikan kepada pemerintah desa telah sesuai dengan hasil yang ada. Sebagai instansi pemerintahan yang baik dapat menerima seluruh keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dan keluhan tersebut akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah desa untuk memperbaiki di periode berikut pada saat menerima bantuan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis (Rini & Hasim, 2021).

Implementasi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Desa Semabung menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berasal dari PLN Nusantara Power, PT Jamkrindo Kanwil VI Surabaya, dan JNE Cabang Utama Surabaya dikelola oleh Pemerintah Desa Semabung dengan memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat. Pemanfaatan dana dan sumber daya *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur desa seperti jalan lingkungan, saluran irigasi, fasilitas umum, serta sarana pendukung pelayanan masyarakat (Sabaruddin et al., 2025). Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas,

kenyamanan, serta aktivitas sosial ekonomi warga desa secara menyeluruh. Pemerintah Desa Semambung juga mengarahkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta dukungan terhadap usaha ekonomi produktif (Hajad et al., 2025). Program pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan manajemen usaha kecil menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan CSR yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari entitas bisnis, masyarakat didorong untuk lebih mandiri, kreatif, dan mampu mengelola potensi lokal yang dimiliki secara berkelanjutan.

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator agar setiap program yang dilaksanakan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Sabaruddin et al., 2025). Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sinergi antara pemerintah desa, entitas bisnis, dan masyarakat menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PLN Nusantara Power, PT Jamkrindo Kanwil VI Surabaya, dan JNE Cabang Utama Surabaya, Pemerintah Desa Semambung berupaya menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil implementasi program tersebut tidak hanya terlihat dari perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat (Rini & Hasim, 2021). Dengan pengelolaan yang optimal, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pembangunan desa secara jangka panjang. Keberlanjutan program CSR juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan

untuk mengukur efektivitas program serta memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan benar benar dirasakan oleh masyarakat penerima (Rini & Hasim, 2021). Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah desa dapat melakukan perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan program di masa mendatang. Permasalahan ini penting agar pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan sosial ekonomi desa (Hajad et al., 2025). Pendekatan ini memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Desa Semambung yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Upaya kolaboratif ini mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan strategi tata kelola *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta pengintegrasian program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa (Rini & Hasim, 2021). Penerapan pendekatan ini, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak akan lagi dinilai dan dipandang sebagai kegiatan yang bersifat membatalkan kewajiban saja, tetapi sebagai komponen integral dan strategis dalam mendukung agenda Pembangunan desa (Sabaruddin et al., 2025). Penelitian ini akan mengulas secara mendalam terkait strategis pengelolaan pemerintah desa semambung dalam menerima dan mendistribusikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis yang berada di wilayahnya. Dalam suatu pengelolaan diperlukan adanya proses akuntabilitas dan transparansi agar tercapainya program yang telah dirancang sesuai rencana awal. Penggabungan aspirasi dan masukan masyarakat dengan alokasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan pertikaian permasalahan yang mengganggu hubungan harmonisasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Perwujudan proses *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan memberikan nilai tambah

kepada entitas bisnis dan pemerintah desa jika berhasil mengambil hati para masyarakat. Entitas bisnis akan mendapatkan keuntungan banyak, jika berhasil mendapatkan rasa simpati dan empati dari masyarakat yang akan mempengaruhi citranya kepada para pemangku kepentingan yang ada (Hajad et al., 2025). Proses pemasukan dari aktivitas pendanaan akan lancar jikalau perusahaan berhasil memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Citra dari entitas bisnis dapat di bangun dari hal kecil yang akan berdampak pada masyarakat. Pihak pemerintah desa juga akan merasakan akan hal yang sama dengan entitas bisnis jikalau berhasil mengambil hati dan rasa kepercayaan untuk mengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan baik.

1.2 Fokus Fenomena Penelitian

Paparan latar belakang penelitian menunjukkan adanya fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh Pemerintah Desa Semambung. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengelolaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersumber dari entitas bisnis di sekitar wilayah desa. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena tersebut secara komprehensif sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan yang berlangsung. Fokus penelitian selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa mini research sebagai berikut:

1. Pengalaman Pemerintah Desa Semambung yang menjadi subjek penelitian dalam mengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis lingkungan sekitarnya.
2. Analisis makna dan persepsi Pemerintah Desa Semambung terhadap tindakan pengelolaan yang mereka lakukan, termasuk alasan, pembenaran, dan refleksi yang menyertainya.
3. Kesadaran etis Pemerintah Desa Semambung terhadap prinsip – prinsip tata kelola yang baik, etika profesi, dan nilai – nilai pancasila beserta Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Penelusuran kebiasaan sosial dan organisasi yang mempengaruhi perilaku penyimpangan pengelolaan, seperti tekanan dari lingkungan organisasi, budaya organisasi, sistem evaluasi, dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Semambung dalam merealisasikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mensejahterakan masyarakatnya.
5. Persepsi yang muncul dari pihak entitas bisnis dan masyarakat Desa Semambung terkait pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, sebagai wujud implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah terjadi selama ini.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, permasalahan yang muncul akan melahirkan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semambung dalam mengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis di lingkungannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penerimaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis kepada pemerintah desa semambung lalu disalurkan kepada masyarakat akan memunculkan suatu prosedur dan rencana yang jelas. Dalam proses penerimaan hingga realisasi akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pengelolaan yang memadai harus ada di dalam pemerintah desa semambung, sehingga akan ada dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semambung dalam mengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis di lingkungannya

1.4 Manfaat Penelitian

Pembahasan yang akan diulas secara mendalam dalam penelitian ini akan memberikan manfaat bagi beberapa bagian, meliputi:

A. Bagi Mahasiswa Peneliti

1. Mengetahui alur dan proses realisasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh pemerintah desa semabung.
2. Mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa semabung dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah desa semabung pada saat menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Upaya mencegah persepsi prasangka buruk dari masyarakatnya.

B. Bagi UPN Veteran Jawa Timur

1. Mendukung Pembangunan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik dan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan.
2. Memperkuat peran kampus dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Bagi Pemerintah Desa Semabung

1. Memberikan rekomendasi dari prosedur pengelolaan yang selama ini dilakukan pada saat penerimaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Memberikan pandangan prosedur yang baik agar terhindar dari penilaian buruk dari masyarakat.
3. Membantu menemukan dan memberi masukan titik permasalahan pada saat menerima program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari entitas bisnis di lingkungan sekitarnya.
4. Mengurangi potensi konflik sosial melalui perbaikan tata Kelola dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

D. Bagi Entitas Bisnis pemberi program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk masyarakat desa semabung.

2. Menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai target dan sasaran.
3. Memperkuat hubungan untuk Pembangunan bisnis berkelanjutan antara entitas bisnis, pemerintah desa semambung, dan masyarakat sekitarnya.